

ARGUMEN-ARGUMEN KEMUNCULAN AWAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Mohamad Nur Yasin

Fakultas Syariah UIN Malang,
Email: yasinm.nuryasin@yahoo.co.id
Telp. 081333579924

Abstrak

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia terus berlangsung pesat dan cepat. Salah satu periode yang unik dan menarik dari rangkaian panjang perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah periode pematangan konsep dan rintisan awal yang berlangsung antara 1992-2000. Pada saat itu masih ada satu bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan statusnya sebagai Bank Umum Syariah pertama di Indonesia, BMI menjadi pilot proyek dan trademark kebangkitan serta implementasi secara besar-besaran hukum ekonomi Islam di Indonesia. Dekade pada saat BMI berdiri menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Periode ini sangat strategis karena mengawali dan menjadi batu loncatan keberhasilan atau kegagalan perkembangan perbankan syariah pada era selanjutnya. Oleh karena itu, pesatnya perkembangan Perbankan Syariah saat ini tidak lepas dari sejarah awal kemunculan BMI. Tulisan ini mengkaji latar sosio-historis-politis kemunculan awal BMI sebagai embrio perbankan syariah di Indonesia. Merefleksi sejarah sangat urgen dan diperlukan guna meneropong masa depan yang lebih cerah dan terarah.

After their formative period in 1992s to 2000s, Syariah banks show a rapid development. As the first syariah bank in the country, Bank Muamalat Indonesia (BMI) is quick to become a pilot project and an icon of Islamic economic awaking and implementation in the country. The establishment of BMI was considered an awaited momentum and a step towards the success of other syariah banks of the later era. The flourish of syariah banks in this period is not inseparable from the history of BMI establishment. This article seeks to analyze socio-political and historical background of BMI as an embryo of syariah banks in Indonesia.

Kata Kunci: BMI, posmodernisme, historis

Diabadikannya ide-ide mengenai ilmu ekonomi konsensus, suku bunga, kebijakan moneter, konsep manusia ekonomi yang egois, dan ilmu ekonomi yang bebas nilai merupakan bahaya yang sangat mengerikan dari pengembangan perbankan dengan sistem bunga. Proses menampilkan keberanian dan kepemimpinan yang tangguh bagi penguatan perbankan syariah menjadi salah satu terapi

strategis dan harus terus diperjuangkan.¹ Di Indonesia, setelah berproses selama enam belas tahun, tepatnya sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada tahun 1992 sampai tahun 2008, Perbankan Syariah memiliki legitimasi yuridis yang semakin sempurna dalam tata hukum perbankan nasional. Hal ini ditandai dengan terbitnya

¹ Tarek El-Diwany, *The Problem with Interest* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), 232

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia telah berlangsung pesat dan cepat. Salah satu periode yang unik dan menarik dari rangkaian panjang perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah periode pematangan konsep dan rintisan awal yang berlangsung pada dekade 90-an. Pada saat itu masih ada satu bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan statusnya sebagai Bank Umum Syariah pertama di Indonesia, BMI menjadi *pilot project* dan *trademark* kebangkitan serta implementasi secara besar-besaran pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia. Dekade di mana BMI berdiri menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Periode ini sangat strategis karena menjadi batu loncatan keberhasilan atau kegagalan perkembangan perbankan syariah pada era selanjutnya. Hamparan panjang dinamika perbankan syariah di Indonesia tidak bisa lepas dari eksistensi BMI.²

Untuk mendapat gambaran yang mendalam mengenai latar belakang pembentukan BMI, setidaknya ada lima asumsi dasar yang penting untuk dicermati. *Pertama*, *mainstream* pemikiran posmodernisme. *Kedua*, perjuangan panjang umat Islam Indonesia. *Ketiga*, kontinuitas sejarah Bank Islam. *Keempat*, politik akomodasi Soeharto. *Kelima*, refleksi sifat diri, lembaga, dan situasi.

Mainstream Pemikiran Posmodernisme

Telah tercatat dalam sejarah peradaban manusia bahwa pada zaman pertengahan telah terjadi konflik yang sangat keras dan tragis antara kalangan gereja yang berpegang pada dogma dan para ilmuwan yang berpegang pada rasio. Perlawanan terhadap agama (Kristen) oleh gerakan rasio-modernitas saat itu terjadi karena pada satu sisi di dalam injil tidak memuat informasi sains dan teknologi.

2 M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Syariah, Geliat Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), iv

Sedangkan di sisi lain para aktivis gereja mencoba terlibat aktif dalam kajian-kajian sains. Sehingga, yang selalu muncul di kalangan gereja adalah sains subjektif-dogmatis versi gereja yang selalu bertentangan dengan sains objektif hasil kajian para ilmuwan. Lebih tragis lagi, para ilmuwan yang bertentangan dengan gereja divonis sesat, sehingga digantung atau dipaksa bunuh diri, seperti yang terjadi pada Galileo dan Copernicus. Perlawanan terhadap gereja terus dilakukan oleh Rene Descartes, Emmanuel Kant, Sigmund Freud, Frederich Nietzsche dan sebagainya sampai akhirnya pada abad XVII muncul era modern yang benar-benar terbebas dari kungkungan dogmatika gereja.

Tidak dapat disangkal bahwa modernitas telah memberikan sekian banyak kemudahan bagi hidup manusia. Sayangnya, modernitas hanya memberikan kemajuan dari sisi material sementara dari sisi spiritual, manusia semakin mengalami kekeringan. Proyek kesadaran diri yang melahirkan otonomi kebebasan manusia menjadikan manusia sebagai individu-individu, yang berpikir tentang dan akan dirinya sendiri. Modernisasi telah menghadirkan wajah kemanusiaan yang buram. Setelah terpola dalam kehidupan yang mekanistik, muncul kegelisahan dan kegersangan psikologis yang disebabkan oleh tercerabutnya kehidupan spiritual. Akibat yang paling parah adalah terjadinya krisis tentang makna dan tujuan hidup.³

Kondisi ini memunculkan kesadaran baru, bahwa pandangan dunia yang materialistik dan kapitalistik tidak cukup membebaskan manusia dari teror dan ketakutan. Kesadaran baru juga melahirkan paham spiritual posmodern yang mengakomodasi iman dan ilmu, yakni tidak anti ilmu dan tidak anti rasional, sehingga lahir kembali perhatian terhadap metafisika, religiusitas, dan agama.⁴

3 *Posmodernisme dan Kebangkitan Agama*, 25 November 2009, http://www.nuansaislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=273:posmodernisme-dan-kebangkitan-agama&catid=85:filasafat&Itemid=273

4 Ibid.

Posmodernisme,⁵ sebagai sebuah era dan metodologi berpikir, merupakan gerak simultan dari era sebelumnya, yaitu tradisionalisme dan modernisme, terutama, setelah tradisionalisme dan modernisme tidak memberikan jaminan kepastian bagi kehidupan manusia. Pergeseran paradigma dari tradisionalisme ke modernisme, dari modernisme ke posmodernisme, dan loncatan-loncatan paradigma yang berjalan secara terus menerus, dalam perspektif sosiologi memunculkan suatu kajian yang oleh Ernest Gellner disebut *a pendulum swing theory*.⁶ Seperti yang diungkap Hadiwinata, modernisme tidak sekadar mencakup hegemonisasi peradaban Barat atas peradaban Timur, industrialisasi, teknologi, dan konsumerisme, namun juga memunculkan rasialisme, diskriminasi, stagnasi, dan marginalisasi.⁷ Posmodernisme memberikan ruang bagi manusia yang aktif, mencari politik posmodernisme baru, dan memberikan peran yang besar bagi agama,⁸ sehingga berimplikasi kepada dua hal. *Pertama*, dijadikannya agama oleh masyarakat global sebagai landasan dan ciri penting kehidupan. Tidak heran jika nuansa keagamaan (religiusitas atau spiritualitas) semakin menguat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.⁹ *Kedua*, dijadikannya agama untuk menyemangati dan menjiwai kajian lintas disiplin.¹⁰

5 Thomas Docherty (ed), *Postmodernism* (New York: Harvester Wheatsheaf); Akbar S. Akhmad, *Postmodernisme and Islam* (London: Routledge, 1992); dan Ernest Gellner, *Postmodernisme, Reason, and Religion* (London: Routledge, 1992)

6 Ernest Gellner, *A Pendulum Swing Theory of Islam, Annales de Sociologie* (1968), 5-14, yang kemudian diterbitkan ulang pada Roland Robertson (ed.) *Sociology of Religion: Selected Readings* (Australia; Penguin Books, 1969), 127-138

7 Bob Sugeng Hadiwinata, "Thestrum Politicum": Posmodernisme dan Krisis Kapitalisme Dunia", dalam *Kalam*, edisi 01, 23

8 Pauline M. Rosenau, *Postmodernisme and The Social Sciences: Insight, Inroads, and Intrusions* (New Jersey: Princeton University Press, 1992), 171

9 Akhmad Minhadji, "Supermasi Hukum dalam Masyarakat Madani: Perspektif Hukum Islam", dalam *Unisia*, No. 41/XXII/IV/2000

10 Sebagai contoh, ketika mengkaji ekonomi Islam Iwan Triyuwono memulai dengan kajian

Posmodernisme mengakui eksistensi agama-agama dan hal-hal yang dimarginalkan oleh modernisme. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi posmodernisme untuk menolak metodologi agama, termasuk di sini adalah metodologi Islam.¹¹ Posmodernisme memberikan dasar-dasar justifikasi dan legitimasi yang mendasar dalam mengantarkan umat Islam menuju kepada paradigma syariah di bidang ilmu ekonomi.¹² Dalam konteks paradigma syari'ah, diskursus Perbankan Syariah, terkhusus BMI, menemukan jati dirinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa fundamental konstruksi BMI menggunakan paradigma syariah.

Karakter fundamental yang khas dari paradigma syari'ah, seperti diungkap Mohammad Arif, adalah *khali'fatu fi al-ardl*.¹³ Individu tidak sebatas hanya diperhambakan kepada kolektivitas dengan tanpa menghargai kemaslahatan individu itu sendiri sebagaimana dicirikan paradigma marxian dengan dialektika materialismenya. Tidak pula, individu sekadar bermakna individualisme utilitarian di mana individu hanya diperhambakan untuk kepentingan individu sebagaimana dicirikan ekonomi pasar (kapitalisme) dengan *laissez faire*-nya. Tetapi, yang dimaksudkan dengan *khali'fatu Allāh fi al-ardl* setidaknya ada dua hal. *Pertama*, individu yang bermakna representasi dan untuk kemaslahatan kolektif. *Kedua*,

posmodernisme. Lihat, Triyuwono "Diri Muthmainah dan Disiplin Sakral", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 3 VII/1997, 24-35; Akhmad Minhadji mengkaji ushul fiqh dalam kerangka posmodernisme, lihat Minhadji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", dalam *al-Jami'ah*, IAIN Sunan Kalijaga, No. 63/VI/1999, 12-28; Amin Abdullah mengkaji masalah sosial dengan menggunakan bingkai posmodernisme, lihat Abdullah, *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer* (Bandung, Mizan: 2000), 68-88; dan Ariel Heriyanto mengkaji bahasa dalam tatapan posmodernisme, lihat Heriyanto "Bahasa dan Kuasa", dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1996), 94-103

11 Triyuwono, "Diri..." 27

12 Triyuwono, "Diri..." 28

13 Mohammad Arif, *Toward the Syari'ah Paradigm of Islamic Economic: The Beginning of a Scientific Revolution* (The American Journal of Islamic Social Science), 92

kolektivitas yang menghargai dan memberi perhatian yang besar pada kemaslahatan individu di tengah kemaslahatan kolektif.

Mengacu kepada *a pendulum swing theory* Ernest Gellner yang memotret adanya pergeseran atau loncatan-loncatan akan terus berjalan dari satu titik paradigma ke titik paradigma yang lain, bisa dikatakan bahwa BMI merupakan satu titik atau tahap tertentu yang keberadaannya adalah bukan suatu kebetulan dan tidak lepas dari kemestian untuk dilewati oleh loncatan-loncatan paradigma perbankan sebelum dan sesudahnya. Jika perbankan yang ada sebelum Bank Syariah telah mengindikasikan dominasi paradigma modern,¹⁴ dan Bank Syariah menggunakan paradigma syariah, bukan tidak mungkin bahwa perbankan yang muncul setelah Bank Syariah adalah perbankan yang dijiwai paradigma pasca-posmodernisme yang indikasi dan karakternya belum bisa diprediksi saat ini. Dalam konteks inilah kehadiran BMI tak lepas dari *mainstream* diskursus posmodernisme.

Perjuangan Panjang Umat Islam Indonesia

Sejak kedatangannya di Indonesia pada sekitar abad ke-8 hingga saat ini, umat Islam selalu dan akan terus melakukan syiar Islam dengan prinsip *li ilai kalimatillâh wa li ibtighâi mardlâtillâh*. Prinsip perjuangan umat Islam tidak pernah berubah, tetapi sifat dan karakter perjuangan selalu berubah antara satu zaman dan zaman yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Secara umum, perjuangan umat Islam, seperti yang dikemukakan Bahtiar Effendi, terpola ke dalam tiga karakter. *Pertama*, periode prakemerdekaan, dicirikan oleh seruan ke arah kesatuan Islam dan negara. *Kedua*, periode pasca-revolusi, dicirikan oleh perjuangan Islam sebagai dasar ideologi negara. *Ketiga*,

14 Setidaknya ada tujuh paradigma modern yang secara bergantian menjawai perbankan konvensional: paradigma merkantilis, paradigma pisiokratik, paradigma klasikal, paradigma neo-klasikal, paradigma marxian, paradigma keynesian, dan revolusi balik paradigma neo-klasik. Lihat, Arif, *Toward...*, 92

periode Orde Baru, dicirikan oleh penjinakan idealisme dan aktivitas politik Islam.¹⁵

Tahapan perjuangan tersebut pada puncaknya memunculkan intelektualisme yang baru, tepatnya pada paruh kedua abad ke-20 dan terpola ke dalam tiga aliran pemikiran.

- Pembaharuan teologis keagamaan dengan isu sentral seruan desakralisasi, reaktualisasi, dan pribumisasi. Tokoh-tokohnya, seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Harun Nasution, John Effendi, dan Munawir Sadzali.
- Reformasi politik dan birokrasi, dengan isu sentral menjembatani jurang ideologis antara Islam politik dan Negara. Tokohnya, seperti Dahlan Ranuwiharjo, Mintaredja, Sulastomo, dan Mar'i Muhammad.
- Transformasi sosial, dengan isu sentral memperkaya makna politik Islam. Tokoh-tokohnya, antara lain Sudjoko Prasodjo, Adi Sasono, dan M. Dawam Rahardjo.

Kaukus dari keseluruhan aliran pemikiran tersebut pada akhirnya bermuara pada dua tema pokok. *Pertama*, pengembangan tatanan-tatanan politik yang egalitarian. *Kedua*, pengembangan proses ke arah pemerataan ekonomi.¹⁶

Bagi umat Islam, pemerataan ekonomi yang dimaksudkan adalah ekonomi yang berbasis pada tatanan nilai ekonomi Islam serta membumi dalam lingkup sosio-kultur Indonesia. Ekonomi yang tidak terbatas nuansa normatif. Lebih dari itu adalah ekonomi yang secara praktis bisa dirasakan dan dilaksanakan umat Islam. Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika kemunculan Bank Muamalat Indonesia di tengah kehidupan sosio-ekonomi umat dianggap sebagai *out put* penting dari perjuangan panjang umat Islam.

Namun demikian, pembentukan BMI bukanlah sebuah proyek eksklusif Islam. Ia adalah proyek sebuah bangsa. Bagi umat Islam, pembentukan BMI adalah sebuah peristiwa

15 Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta; Paramadina, 1998), 61-111

16 Effendi, *Islam...*, 196

monumental. Sejak kemerdekaan disusul era jatuh bangunnya lembaga keorganisasian Islam yang terjadi hanyalah pemfusian, tambal sulam, perevisian, dan perbaikan arah, isi, materi, serta program-program kerja lembaga tersebut.¹⁷ Apabila ditelusuri jauh ke belakang terkait dengan pembentukan lembaga bisnis keuangan kemudian menuju kepada masa pembentukan Sarikat Dagang Islam (SDI), bisa dirasakan bahwa jangka waktu menunggu hingga berdiri lagi sebuah lembaga bisnis keuangan Islam mendekati masa 100 tahun. Oleh karena itu, keberhasilan BMI adalah mutlak. Kegagalan BMI akan memerlukan waktu 50 hingga 100 tahun lagi untuk dapat menumbuhkan sebuah lembaga baru yang sama.¹⁸ Apakah BMI sebagai *out put* perjuangan akan dipelihara dan diberdayakan secara baik-baik? Hal ini tentunya masih memerlukan tindak lanjut yang sungguh-sungguh dari umat Islam.

Kontinuitas Kesejarahan Perbankan Islam

Didalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan dilakukan dengan akad sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktek menitipkan harta dan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Fungsi-fungsi perbankan modern, seperti menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah dan berlanjut ke era sahabat, era Umayyah, era Abbasiyah, dan zaman pertengahan.¹⁹

Pada zaman Rasulullah Saw, suatu sistem moneter mendominasi. Saat itu satu dinar yang beredar beratnya 4,25 gram terdiri atas emas dan satu dirham yang beratnya 3,98 gram

17 Zainul Bahar Noor, "Sebuah Mimpi, Harapan, dan Kenyataan di Hadapan", Makalah pada Seminar Sehari " Kiat Bisnis dari Sudut Pandang Islam", di Garden Palace Hotel Surabaya, 12 September 1992, 1

18 Noor, "Sebuah...", 2

19 Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 18

perak.²⁰ Dalam konteks modern, perbankan Islam berkembang pesat di berbagai negara Islam pada abad XIX dan abad XX. Di Indonesia, perbankan Islam yang pertama kali berdiri adalah Bank Muamalah Indonesia (BMI). Keberhasilan BMI tidak lepas dari sejarah perbankan Islam secara keseluruhan.

Ada tiga faktor penting yang menopang maraknya pembentukan perbankan Islam di berbagai negara Islam. *Pertama*, penafsiran kaum neo-revivalis terhadap bunga sebagai riba'. *Kedua*, booming minyak di negara-negara teluk. *Ketiga*, penyesuaian terhadap tafsir tradisional mengenai riba' oleh sejumlah umat Islam dalam membuat kebijakan. Ada tiga model kebijakan di kalangan negara Islam terkait dengan promosi perbankan Islam, yaitu (a) adanya larangan bunga di dalam hukum negara Islam, (b) keputusan untuk menginternasionalisasikan bank Islam, dan (c) partisipasi pemerintahan Muslim di dalam gerakan perbankan Islam.²¹

Ide perbankan Islam modern mulai ada pada abad ke-20. Pada era 40-an sudah muncul konsep perbankan Islam, namun tidak terealisasi.²² Kondisi saat itu belum memungkinkan dan konsep bank Islam masih mentah.²³ Pemikiran-pemikiran penulis yang mula-mula menyampaikan gagasan perbankan berdasarkan bagi hasil (*profit Sharing*) ialah Anwar Qureshi (1946), Naiem Shidiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian lebih rinci tentang gagasan itu ditulis al-Maududi pada 1950. Tulisan Muhammad Hamidullah yang ditulis pada 1944, 1955, dan 1962 bisa dikategorikan sebagai ide pendahuluan mengenai perbankan Islam.²⁴

20 Tarek El-Diwanly, *The Problem With Interest, Sistem Bunga dan Permasalahannya*. Terj. Amdiar Amir dan Ugi Suharto (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 222

21 Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba' and Its Contemporary Interpretation* (Leiden-New-York-Koln: E.J. Brill, 1996), 8-11

22 Saeed, *Islamic...*, 10

23 Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 8

24 Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*

Langkah pendahuluan atas pelaksanaan sistem *profit and loss sharing* dilakukan di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara profesional dan modern. Rintisan kelembagaan yang lain adalah pembentukan Islamic Rulal Bank di wilayah Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo Mesir,²⁵ tepatnya dibuka pada tanggal 25 Juli 1963 dengan 1000 orang depositor tabungan.²⁶ Akibat situasi politik, bank ini diambil alih National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt pada tahun 1967.²⁷

Pada awalnya pembentukan bank Islam banyak diragukan karena beberapa alasan. *Pertama*, banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim. *Kedua*, sehubungan dengan adanya pertanyaan tentang bagaimana bank Islam itu akan membiayai operasionalnya.²⁸

Posisi mudharabah sebagai legitimator dan justifikator aktifitas perbankan Islam ternyata tidak sepi dari kritik keras sejumlah ulama.²⁹ Pada intinya mereka tidak bisa menerima upaya-upaya yang menjadikan mudharabah sebagai pijakan fundamental untuk mengabsahkan aktivitas perbankan Islam. Argumentasi para pengkritik tersebut dirangkum dengan baik oleh Sutan Remy Syahdeini berikut ini.

Pertama, mereka mengemukakan bahwa perjanjian *mudlārabah* telah dikembangkan di abad pertengahan sesuai dengan keadaan-keadaan tertentu pada waktu

(Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), 4

25 M. Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 18

26 Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Lahore: Muhammad Ashraf, 1970), 172 dan Saead, *Islamic...*, 14

27 Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek* (Jakarta: Alfabet, 1999), 11

28 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994), jld. I, 233

29 Kritik keras atas pemberlakuan konsep mudlarabah antara lain dilakukan Khursid Ahmad, Hasanuz Zaman, dan Abdullah Saead.

itu. Perjanjian ini tidak memiliki validitas kepada pelaksanaan aktivitas-aktivitas keuangan modern pada masyarakat industri yang kompleks. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa para ahli hukum dan ahli teologi Muslim mutakhir tidak memiliki hak untuk melakukan penafsiran ulang atas asas-asas hukum terdahulu, yang telah merupakan ijtihad. Dengan kata lain, mudlarabah dikembangkan di abad pertengahan adalah untuk waktu dan untuk keadaan ekonomi pada waktu itu dan berlakunya berdasarkan ijtihad para ulama atau para ahli hukum dan para ahli teologi Muslim pada waktu itu, tidak dapat ditafsirkan atau dimodifikasikan oleh para ahli hukum dan ahli teologi Muslim masa kini untuk keadaan ekonomi atau untuk keperluan pada waktu ini yang telah berbeda dengan keadaan ekonomi pada abad pertengahan itu.

Kedua, perjanjian mudlarabah juga ditolak berdasarkan alasan politik-ideologis (*politic-ideological grounds*). Menurut pendapat mereka bahwa bank-bank Islam, yang didirikan oleh para kapitalis Muslim, akan mengeksploitasi para penabung kecil melalui penggunaan instrumen-instrumen keuangan yang agamis sebagai sarana yang legal. Para pemegang saham dari bank-bank Islam akan menggunakan dana-dana dari para penyimpan dana yang kecil-kecil untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa harus membahayakan kekayaan mereka sendiri. Resiko bank yang terjelek yang dialaminya sebagai mudlarib bila terjadi kerugian atas transaksi mudlarabah ialah hanya sekadar berupa tidak menerima remunerasi atas jerih payahnya, bukan berupa memikul resiko finansial.

Ketiga, diperkenalkan mudlarabah sebagai suatu alternatif dari transaksi keuangan berdasarkan bunga (*interest*) telah dikecam berdasarkan alasan bahwa mudlarabah akan menciptakan atau meningkatkan pasar uang yang informal yang berdasarkan bunga. Para penabung akan memilih untuk meminjamkan dana mereka guna memperoleh harga atau bunga yang

tersembunyi di dalam pelunasan jumlah pokok daripada menyimpan dana itu pada bank yang berdasarkan mudlarabah yang beresiko.³⁰

Tanpa harus terpengaruh dengan kritikan-kritikan keras tersebut, tampaknya upaya-upaya ke arah implementasi konsep mudlarabah untuk mendasari kegiatan perbankan Islam terus dilakukan para ilmuwan Muslim yang punya konsen tinggi terhadap perbankan Islam.

Gagasan pendirian bank Islam berlanjut dalam konferensi negara Islam sedunia di Kuala Lumpur Malaysia, 21-27 April 1969, yang diikuti 19 negara. Konferensi menghasilkan beberapa keputusan. *Pertama*, tiap keuntungan harus tunduk pada hukum untung rugi. Jika tidak, ia termasuk riba. Sedikit atau banyak riba tetap haram. *Kedua*, diusulkan pendirian bank Islam yang bersih dari sistem riba. *Ketiga*, sambil menunggu pembentukan bank Islam, bank konvensional yang ada diperbolehkan beroperasi dengan alasan *darurat*.³¹

Dalam sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) ke-2 di Karachi, Pakistan, Desember 1970, diputuskan pembentukan *Islamic Development Bank* (IDB).³² Pada 1972, Mesir memperkenalkan bank tanpa bunga dengan mendirikan Naser Social Bank.³³ Pada 1973 berdiri Philippine Amanah Bank di Manila. Pada tahun 1975 (sebelum IDB), berdiri Dubai Islamic Bank di Dubai.³⁴

Dalam sidang I Konferensi Menteri Keuangan Negara Islam di Jedah, Arab Saudi, 18 Desember 1973, ditandatangani *Declaration of Intent for the Establishment of Islamic Development Bank* (DIE-IDB). Pada

sidang II Menteri Keuangan negara Islam di Jedah, 10-12 Agustus 1974, disetujui pendirian IDB. Setelah dipenuhi semua ketentuan mengenai penyerahan *Instrument of Ratification* oleh negara anggota dengan modal 500 juta Islamic Dinar (ID), maka pada 23 April 1975 IDB dinyatakan berdiri aktif. Pada 26-28 Juli 1975 diadakan sidang pembukaan (*Inagurine Meeting*) di Riyadh, Arab Saudi.³⁵ Menyusul kemudian pada tahun 1977 berdiri dua bank swasta bebas bunga dengan nama Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Pada tahun yang sama (1977) pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House.³⁶

Indonesia merupakan salah satu pendiri IDB yang menandatangani *Agreement Establishing of IDB* pada 12 Agustus 1974 di Jedah. Keanggotaan Indonesia dikukuhkan dengan Kepres RI No. 5 th 1975, tertanggal 17 Maret 1975. Kontribusi Indonesia pada IDB sebesar ID 63,1 juta dan kontribusi pada *Longer Term Trade Financing* sebesar US\$ 3 juta. Hasil sidang ke-12 Dewan Gubernur IDB di Tunisia, Indonesia berada dalam satu kelompok bersama Brunei Darussalam dan Malaysia.³⁷

Di negara-negara Islam, pada tahun 1978, tercatat empat puluh bank dan dua puluh lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip syariah.³⁸ Pada tahun 1991, lebih dari dua ratus bank dan lembaga keuangan Islam beroperasi di seluruh dunia, baik negara-negara Islam maupun negara-negara non-Islam.³⁹ Jumlah tersebut meningkat tajam pada akhir 1999, yakni tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam.⁴⁰ Keberhasilan bank Islam diberbagai negara memberi inspirasi bagi kemungkinan berdirinya bank Islam di Indonesia. Ketika memasuki dekade 80-an, sebenarnya sudah mulai ada perbincangan

30 Syahdeini, *Perbankan...*, 119-120

31 Sumitro, *Asas-asas...*, 8

32 Karnaen Perwataatmadja dan M. Syaffi Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Yayasan Dana Bhakti Wakaf, 1992), 58 dan Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996), 155

33 Arifin, *Memahami...*, 11

34 Muhammad Nejatullah Shidiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literatur* (Leicester: Islamic Foundation, 1981), 39

35 Perwataatmadja, *Apa...*, 58

36 ALM. Abdul Gafoor, *Interest Free Commercial Banking* (1995), chapter 4.

37 Perwataatmadja, *Apa...*, 60

38 Sumitro, *Asas-asas...*, 53

39 Karnaen Perwataatmadja, "Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalat Indonesia", makalah tidak diterbitkan, 21 November 1991, 11

40 Antonio, *Bank...*, 18

perbankan Islam untuk menopang sistem perekonomian Islam. Perbincangan itu, setidaknya, dilakukan M. Amin Aziz (FE UI), AM. Saefudin (IPB Bogor), M. Dawam Rahardjo (LP3S), dan Karnaen A. Perwataatmadja (Departemen Keuangan).⁴¹ Beberapa eksperimen dilakukan, seperti *Baitul Tamwil* di Masjid Salman ITB Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.⁴² Keduanya tumbuh mengesankan.⁴³ Namun, ide pembentukan bank Islam tersebut masih sporadis, lokalistik, dan belum menasional. Saat itu (1980-1982) kondisi politik dalam negeri masih sangat panas bahkan berada pada puncak titik didih, terutama berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mewajibkan dipakainya asas tunggal Pancasila bagi semua organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Dalam situasi yang seperti ini bisa dimaklumi jika gagasan mengenai perbankan Islam belum populer dan tidak mendapat respon positif dari masyarakat umum dan belum ada *political will* dari pemerintah.

Seiring dengan mulai mendinginnya situasi politik dalam negeri, perbincangan bank Islam terus bergulir, dari lokalistik ke nasional, sambil mencari peluang dan merespon berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Untuk mendirikan bank Islam di Indonesia harus mengikuti kebijakan moneter yang ada.

Sebelum dan sesudah deregulasi perbankan 1 Juni 1983 bank Islam belum bisa beroperasi di Indonesia. Sebab, pemerintah menentukan besar bunga yang harus dilaksanakan bank. Setelah muncul Pakto 1988 yang membolehkan setiap bank untuk menetapkan besar bunga meskipun nol persen, bank Islam mulai berdiri.⁴⁴ Deregulasi perbankan 1 Juni 1983 bertujuan

meningkatkan volume dana domestik melalui perbankan; mengurangi ketergantungan bank pada bank-bank sentral dan meningkatkan efisiensi serta profesionalitas bank-bank nasional. Sedangkan Pakto 1988 bertujuan penerahan dana masyarakat; ekspor non-migas, efisiensi lembaga keuangan dan perbankan; kemampuan pengendalian dan pelaksanaan kebijakan moneter; serta iklim pengembangan pasar modal.⁴⁵

Kebijakan di atas diikuti pakem 1985, paket 25 Oktober 1986, Pakjan 15 Januari 1987, Pakdes 24 Desember 1987, Paknov 21 November 1988, Pakdes 20 Desember 1988, Pakmar Maret 1989, Pakjun Juni 1989, Pakjan 1990, dan Pakem 1990. Selain operasional bank Islam harus mengikuti kebijakan moneter di Indonesia, pembiayaan pembangunan repelita berikutnya dikehendaki sebagian besar berasal dari tabungan dalam negeri. Ini berarti kehadiran bank yang mampu menarik dana masyarakat sangat diharapkan. Disinilah peluang bank Islam ikut menyemarakkan perbankan Islam di Indonesia.⁴⁶

Bank Perkreditan Rakyat *Mardlâtillâh* (BPR-M) dan Perkreditan Rakyat "Berkah Amal Sejahtera" (BPR-BAS) tercatat sebagai Bank Islam pertama di Indonesia. Kedua bank yang mendasari diri pada prinsip syariah ini didirikan pada 15 Juli 1991 dan mulai beroperasi pada 19 Agustus 1991 di Bandung.⁴⁷

Keberadaan bank syariah diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil.⁴⁸ UU ini dilengkapi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, 12 Mei 1999, No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasar prinsip syariah, No. 32/35/KEP/DIR tentang BPR, dan No. 32/36/KEP/DIR tentang BPR

41 Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Bangkit), 1992

42 Johan Hendrik Meuleman (et.al.), *Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993* (Jakarta: INIS, 1995), 181

43 Antonio, *Bank...*, 25

44 Perwataatmadja, "Peluang...", 12

45 Sumitro, *Asas-asas...*, 62

46 Sumitro, *Asas-asas...*, 63

47 Iwan Triyono, *Organisasi dan Akutansi Syariah* (Yogya: LkiS, 2000), 99

48 Arifin, *Memahami...*, 212

berdasar prinsip syariah.⁴⁹

Perkembangan lebih riil muncul ketika pada 1992 berdiri Bank Muamalat Indonesia. Dukungan kuat terhadap BMI diberikan pemerintah, ulama⁷ cendekiawan, dan masyarakat umum.⁵⁰ Tim perbankan Majelis Ulama⁷ Indonesia (MUI) bekerja keras. Dalam waktu satu tahun setelah tercetus ide, pada 1 November 1991 dilaksanakan penandatanganan akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Sahid Jaya Hotel dengan notaris Yudo Paripurno. Izin Menteri Kehakiman No. C2.2413.HT.01.01.⁵¹ Pada tahun 1999 (tujuh tahun setelah berdiri BMI) populasi bank syariah masih kecil, yaitu 1 Bank Umum Syariah dan 77 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Hal ini jauh berbeda dengan populasi Bank konvensional, yaitu 208 Bank Umum dan 2231 Bank Perkreditan Rakyat.⁵² Sampai Juli 2008, di Indonesia ada 287 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam berbagai jenis.

Tabel Jumlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia sampai Juli 2008⁵³

No	Lembaga Keuangan Syariah	Jumlah
1	Bank Umum Syariah	4
2	Unit Usaha Syariah Bank Umum	14
3	Unit Usaha Syariah BPD	15
4	Bank Kustodian Syariah	6
5	BPR Syariah	117
6	Asuransi Syariah	42
7	Reasuransi Syariah	3
8	Broker Asuransi dan Reasuransi	6
9	Reksa Dana Syariah	22
10	Obligasi Syariah & Medium Term Notes (MTN)	38
11	Pembiayaan Syariah	11
12	Pegadaian Syariah	1
13	DPLK Syariah	2
14	Bisnis Syariah	4
15	Modal Ventura Syariah	2
16	Lembaga Penjaminan Syariah	1
	Jumlah	287

Menurut data Bank Indonesia, sampai Mei 2005, jumlah nasabah/deposan perbankan syariah lebih dari 2 juta orang. Sedangkan

jumlah nasabah pembiayaan sekitar 300.000-an orang. Data itu belum termasuk nasabah asuransi, pegadaian, pasar modal, dan dana pensiun syariah. Juga belum termasuk nasabah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang mencapai lebih dari 3 juta orang.⁵⁴

Politik Akomodatif Soeharto

Sulit- untuk tidak dikatakan mustahil-mengkaji tipologi politik Soeharto dengan memisahkannya dari perjalanan politik Orde Baru. Soeharto adalah simbol terdepan eksistensi Orde Baru. Hasil penelitian Abdul Aziz Thaba menunjukkan bahwa ada tiga pola hubungan antara pemerintah dan umat Islam dalam politik Orde Baru.⁵⁵

Pertama, pola hubungan antagonistik (1966-1981). Pada tahap ini terdapat kegelian dan kecurigaan yang membabi buta di kalangan pemerintahan (negara) terhadap posisi politik umat Islam dan kuatnya arogansi pemerintah yang mempersonifikasikan diri sebagai algojo yang selalu menggebuk pikiran-pikiran kritis warga negara. Ditandai dengan gagalnya pembentukan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) yang disponsori Muhammad Hatta pada tahun 1967, gagalnya rehabilitasi Masyumi dan berdirinya Parmusi, masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN 1973, kasus rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973, dan maraknya judi kasino di era 70-an.

Kedua, pola hubungan resiprokal kritis (1982-1985). Pada tahap ini terdapat proses saling mempelajari dan saling menjajaki posisi masing-masing. Ditandai oleh depolitisasi umat Islam dengan berdirinya PPP, intervensi pemerintah terhadap permasalahan internal NU, Muhamadiyah, HMI, PII, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa GPK Warsidi Lampung, dan barisan Jubah Putih di Aceh.

Ketiga, pola hubungan akomodatif (1986-1997). Pada tahap ini terdapat saling

54 Agustianto, *Peradilan Agama Dan Sengketa Ekonomi Syariah*. <http://agustianto.niriah.com/> 2008/04/03/peradilan-agama-dan-sengketa-ekonomi-syariah/

55 Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 239-300

49 Arifin, *Memahami...*, 213

50 Triyuwono, *Organisasi...*, 100

51 Laporan Tahunan BMI 1992 (Jakarta: BMI, 1992), 5

52 Bank Indonesia, "Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia" April 1999, 3-4

53 http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/lks_lbs.php?id=66

pengertian. Satu sisi pemerintah (negara) tidak pernah memosisikan diri sebagai drakula atau vampir yang setiap saat siap memangsa rakyat. Pada sisi lain, umat Islam memahami bahwa berbagai kebijakan pemerintah yang diambil tidak akan menjauhkan mereka dari ajaran Islam.

Pola akomodatif terbagi ke dalam empat jenis. *Pertama*, akomodasi struktural, ditandai oleh berdirinya ICMI dan dimasukkannya para aktivis Muslim ke dalam jajaran birokrasi pemerintah. *Kedua*, akomodasi legeslatif, ditandai oleh disahkannya UU Pendidikan Nasional yang mengakomodasi pendidikan agama, lahirnya UU Peradilan Agama, kebolehan berjilbab bagi siswi SMA, SKB tentang Bazis, dan penghapusan SDSB. *Ketiga*, akomodasi kultural, ditandai penyelenggaraan festival istiqlal, penayangan bahasa Arab di TVRI, dan nasionalisasi *assalâmu'alaikum*. *Keempat*, akomodasi infrastruktural, ditandai berdirinya Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YAMP), pengiriman 1000 da'i ke wilayah transmigrasi, pembredelan tabloid Monitor, dan pembentukan Bank Muamalat Indonesia (BMI).⁵⁶

Terkait dengan BMI, pada awalnya, nama yang akan dipakai adalah Bank Syariah Islam Indonesia. Tetapi, tidak disepakati karena dikhawatirkan mengingatkan orang pada piagam Jakarta. Kemudian muncul nama Bank Islam Indonesia, disingkat BASINDO, juga tidak diterima. Bank Karya Islam dan Bank Amal Indonesia, dua nama yang muncul kemudian, juga tidak disepakati. Akhirnya disepakati nama Bank Muamalat Indonesia.⁵⁷ Menanggapi keputusan ini, KH. Hasan Basri, ketua MUI ketika itu, mengatakan:

...presiden adalah orang yang tidak menghendaki sesuatu yang menyebabkan keributan dalam masyarakat kita. Ketika saya menjadi orang pertama yang ditanya beliau mengenai nama bank itu, saya menjawab bahwa namanya adalah Bank Muamalat Islam Indonesia ... kemudian beliau

menyarankan: "pendapat saya adalah, anda tidak perlu mencantumkan kata Islam setelah kata muamalat ... kata muamalat itu sendiri sudah menunjukkan Islam ... jangan mengundang molo (penyakit, pen)..."⁵⁸

Hanya 2 bulan setelah KH. Hasan Basri menghadap Presiden Soeharto, 27 Agustus 1991, terkumpul dana Rp. 64,1 M, Rp. 3 M di antaranya sebagai dana awal diberikan Soeharto dari kas Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YAMP). Pada 3 November 1991, TIM MUI mengadakan silaturahmi dengan Presiden Soeharto dan masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor. Modal total bertambah Rp 116 M.⁵⁹

Sulit melepaskan sejarah pembentukan BMI dari politik akomodatif Soeharto. Situasi politik saat BMI didirikan dalam keadaan pemerintah menerapkan politik akomodatif. Bisa dikatakan, BMI merupakan objektivikasi kesempatan Soeharto yang memanfaatkan aspirasi umat Islam demi kepentingan politiknya. Selain itu, suhu politik Indonesia saat itu berada pada titik terdingin. Hal ini terlihat jelas ketika MUI mempersiapkan pembentukan BMI, para pejabat pemerintahan Orde Baru yang dikunjungi MUI tidak ada yang keberatan. Mereka antusias memberikan dukungan, ekonomi, politik, dan yuridis (lihat kronologis di bawah). Tanpa menafikan faktor-faktor yang lain, akhirnya pada sidang paripurna MPR 1992, Soeharto terpilih lagi dengan mulus sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dengan demikian, situasi sosio-ekonomi-politik saat BMI didirikan dalam keadaan pemerintah menerapkan model politik akomodatif.⁶⁰ Hal ini memunculkan banyak kritik politis yang dialamatkan kepada BMI. BMI dianggap sebagai objektivikasi kesempatan Soeharto yang memanfaatkan aspirasi umat Islam demi kepentingan politiknya. Sebagai bagian dari bangunan besar sistem ekonomi Islam, bagi BMI hal ini

58 Triyuwono, *Organisasi...*, 116

59 *Laporan Tabunan BMI 1992*, 7

60 Thaba, *Islam dan Negara...*, 289

56 Effendi, *Islam...*, 273-309

57 Thaba, *Islam...*, 289

tidak salah. Menurut Muhammad al-Burey, tanpa kekuatan politik tidak ada satupun sistem ekonomi yang dapat diwujudkan. Ekonomi kapitalis bisa kuat karena dukungan politik Amerika. Ekonomi sosialis pernah jaya karena dukungan Uni Sovyet.⁶¹

*Kronologis Kegiatan dan Beberapa Out Put
Penyiapan Pembentukan Bank Muamalat
Indonesia*⁶²

No	KEGIATAN	OUT PUT
1.	Lokakarya Bank Bebas Bunga (18-20 Agustus 1990)	1. Adanya anggapan bahwa bunga bank (a) riba, dan (b) non-riba 2. Adanya petimpangan pendapatan 3. Perlunya didirikan bank Islam
2.	Munas IV MUI (22-25 Agustus 1990)	Merekomendasikan pendirian bank Islam
3.	Pembentukan Pokja Penyiapan Buku Panduan Bank Bebas Bunga (7 September 1990)	Pembentukan panitia kecil penyusunan manual dan pendirian bank Islam
4.	<i>Interhational Workshop on Non-Interest Banking System</i> (17-19 September 1990)	Perbincangan kemungkinan T.A dengan Bank Islam Malaysia Benhard, Dr. Achmad Tajudin Abdurrahman (18 September 1990)
5.	Kunjungan MUI Kepada Dirjen Moneter (26 Oktober 1990) dan Silaturahmi Hotel Kemang (2-11-1990)	Pemantapan MUI perlu segera secara operasional memprakarsai berdirinya Bank Islam Indonesia

6.	Pertemuan MUI Vice Presiden IDB di Hotel Wisata (27 November 1990): Hotel Borobudur (28 November 1990)	1. Kecil kemungkinan untuk kerjasama pendirian Bank Islam dengan IDB karena mereka sulit mengerti kondisi Indonesia 2. Dapat memberikan <i>technical Assistance dan Training</i>
7.	Pertemuan dengan Menteri Agama RI, Munawir Sadzali, MA dalam rangka mempersiapkan Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (2 Desember 1990)	1. Perlu mendinikan Bank Islam 2. Perlu dipikirkan sistem organisasi/ ketentuan yayasan agar memiliki kesinambungan dan mekanisme manajemen/ pengontrolan yang baik
8.	Silaturahmi dengan Menteri Perdagangan RI, Arifin M. Siregar (22 Desember 1990)	1. Mendukung ide MUI dan perlu direalisasi 2. Mengikutsertakan potensi sebanyak mungkin 3. Perlu rencana kongkrit, <i>Feasibility Study</i>
9.	MUI dan Menteri Agama RI, Munawir Sadzali membicarakan konsep akte dan rencana pengurus YDDP (10 Januari 1991)	1. Memproses ke Notaris 2. Mengkongkritkan <i>Feasibility Study</i> 3. Perlu adanya rapat Majelis Pertimbangan MUI diperluas
10.	Silaturahmi dengan Direksi Bank Indonesia (Drs. Binhadi, Dr. Syahril Sabirin, dan T. Syukur Mahmud, S.H. (16 Januari 1991)	Kesepakatan mendiskusikan bersama produk-produk bank Islam (penyerapan dan pemanfaatan dana) sebagai bagian dari proses pengajuan izin
11.	Silaturahmi dengan Menteri Perindustrian RI, Ir. Hartarto (19 Januari 1991)	1. Menyambut positif gagasan MUI 2. Perlu dipersiapkan konsep dalam menggerakkan sentra industri kecil/BPR
12.	Penandatanganan akte notaris Yayasan Dana Dakwah (29 Januari 1991)	Perlu konfirmasi beberapa calon pengurus dan anggota Badan Pembina

61 Muhammad Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, terj. Ahmad Natsir Budiman (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 175

62 Zainul Bahar Noor, "Persiapan dan Oprasional Bank Muamalat Indonesia", Makalah, tidak diterbitkan, 1991

13.	Silaturahmi dengan Menteri Muda Keuangan RI, Nasrudin Sumintapura dan Dirjen Moneter Departemen Keuangan RI (2 Pebruari 1991)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu Diset Tanggal Oprasi Bank Islam Indonesia; 12 Sept '91 2. Perlu diprogramkan langkah-langkah operasional agar target tersebut terlaksana 3. Rapat Majelis Pertimbangan MUI diperluas 	18.	Silaturahmi dengan Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono (2 April 1991)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden memberi mandat kepada Mensekneg untuk menampung ide MUI 2. Ide pembentukan bank Islam disampaikan kepada masyarakat dan dilihat responnya.
14.	Silaturahmi dengan Menteri Muda Kungan RI dan Dirjen Moneter Dep. Keu, membicarakan lokasi gedung Bank Islam (11 Pberuari 1991)	Disepakati mendapat lokasi strategis, untuk sementara dalam bentuk sewa, dan untuk jangka panjang diusahakan membangun gedung sendiri di tempat strategis.	19.	Pertemuan dengan Sukamdani Sahid Gitosarjono (25 April 1991)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipilih 30 org untuk diminta kesediaannya untuk menjadi pemegang saham sendiri 2. MUI diharap melapor ke presiden RI dan meminta YAMP untuk membeli setengah dari saham Bank Islam.
15.	Silaturahmi dengan Menteri Kehakiman RI, Ismail Saleh, S.H. (21 Pembruari 1991)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung penuh ikhtiar mendirikan bank tanpa bunga 2. Menyarankan nama bank Islam Indonesia disisipi satu kata lain di antara kata "bank" dan "Islam" 3. Akan mempercepat pemrosesan pengesahan badan hukum PT. 	20.	Silaturahmi dengan Mensekneg RI, Moerdiono 25 April 1991	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan bantuan Menteri Muda Keuangan, disiapkan RUU perbankan baru yang membuka pintu pendirian Bank Islam 2. Mensekneg menyampaikan ide presiden untuk mengumpulkan masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor
16.	Silaturahmi dengan Menteri Koperasi RI, Bustanul Arifin, S.H. (1 Maret 1991)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung ikhtiar mendirikan bank Islam/ tanpa bunga 2. Perlu ikhtiar yang lebih besar untuk mengumpulkan modal 	21.	Rapat Paripurna Pengurus Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDDP)-MUI 28 Juni 1991	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama dengan Al-Baraqah Group 2. Perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus YDDP
17.	Pembukaan Training Bank Islam di LPPI 29 Maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan, Nasrudin Sumintapura	Ditraining calon staf Bank Islam melalui program MDP selama satu bulan di LPPI	22.	Pertemuan pendahuluan penggalakan inventasi BMI di kediaman Ir. Hartarto (5-8-1991)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian calon investor dalam kelompok kecil atau perorangan tokoh masyarakat 2. Penyempurnaan brosur

23.	Pertemuan Tim Perbankan MUI dengan Presiden Soeharto di Bina Graha (27 Agustus 1991)	1. YAMP meminjamkan dananya untuk persyaratan izin prinsip 2. Presiden Soeharto siap sebagai pemrakarsa 3. Nama Bank <i>Muamalat Indonesia</i>
24.	Silaturahmi dengan Menteri Perhubungan, Ir. Azwar Annas (3 September 1991)	1. Susunan pengurus sementara PT.BMI 2. Melibatkan menteri, pengusaha, dan tokoh masyarakat dalam pendirian PT.BMI 3. Persiapan pertemuan dengan <i>Managing Director BIMB</i>
25.	Penandatanganan <i>Memorandum of Understanding</i> oleh KH. Hasan Basri, Dr. Ir. M. Amin Aziz, dan <i>Managing Director BIMB</i> , Dr. Ir. Abdul Halim Ismail (9-9-1991)	
26.	Pertemuan dengan Wakil Presiden RI, Soedarmono, S.H. (20 September 1991)	1. Wapres Soedarmono bersedia sebagai pemrakarsa 2. Misi BMI adalah ibadah
27.	Penandatanganan akte pendirian PT. BMI di Sahid Jaya Hotel (1 November 1991)	1. Akte ditandatangani kurang lebih 150 org 2. Terkumpul dana untuk saham pendiri BMI Rp. 84 miliar
28.	Silaturahmi dengan Presiden Soeharto dan masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor (3 November 1991)	Tambahan dana untuk PT. BMI, sehingga total modal BMI menjadi kurang lebih Rp. 110 miliar

Refleksi sifat diri, lembaga, dan situasi

Asumsi ini menskenariokan adanya tiga pihak yang bergerak komplementer sehingga tercipta situasi dan realita yang disepakati

bersama.⁶³ Tiga pihak itu adalah umat Islam, situasi sosio-politik Indonesia, dan BMI. Dua pihak yang awal adalah pihak-pihak yang *dependent*. Sementara satu yang akhir adalah pihak yang *dependent*. Dengan demikian, kemunculan BMI tidaklah dengan sendirinya, melainkan hasil transformasi soio-ekonomi-politik umat Islam. Tentang hal ini, premis Berger dan Luckman,⁶⁴ serta Blumer,⁶⁵ sebagaimana dirujuk Iwan Triyuwono, bisa dijadikan justifikasi, yakni realitas (dalam hal ini BMI) tidak bisa dipisahkan dari masyarakatnya, ia adalah produk dari masyarakat dan hasil dari konstruksi sosial.⁶⁶

Ada suatu pola dinamis dari masyarakat bahwa anggotanya berinteraksi dengan lingkungan, yang kemudian memunculkan realisasi pembentukan BMI. Pembentukan BMI mengindikasikan kedewasaan perilaku masyarakat. Ada dua model perilaku, yaitu perilaku institusional (*institutional behavior*) dan perilaku kolektif (*collective behavior*). Perilaku yang pertama menawarkan harapan, sedangkan perilaku yang kedua menawarkan situasi baru. Bila harapan (umat Islam) sudah di institusionalisasikan (dalam bentuk BMI), anggota masyarakat tertentu akan berperilaku sesuai dengan harapannya.⁶⁷ Oleh karena itu, perilaku umat Islam berupa pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan BMI merupakan implikasi dan konsekuensi logis interaksi yang dilakukan dengan lingkungan sosial yang ada, baik pemegang otoritas moneter, otoritas politik, maupun sesama umat Islam khususnya pemodal besar.

Penutup

Dari uraian di atas bisa disarikan bahwa

⁶³ Asumsi ini diangkat dari tulisan Iwan Triyuwono, *Organisasi...*, 99-124, dengan penambahan dan pengurangan yang dipandang perlu

⁶⁴ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of knowledge* (London: Penguin Books, 1966)

⁶⁵ Herbert Blumer, *Symbolik Interactionism: Perspective and Method* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall Inc, 1996)

⁶⁶ Triyuwono, *Organisasi...*, 101-102

⁶⁷ Triyuwono, *Organisasi...*, 103

ada lima asumsi dasar yang melatarbelakangi terbentuknya BMI, yaitu *mainstream* pemikiran posmodernisme, kontinuitas kesejarahan perbankan Islam, perjuangan panjang umat Islam Indonesia, politik akomodatif Soeharto, dan interaksi antara sifat diri, lembaga dan situasi. Kelima asumsi dasar tersebut memperkuat posisi BMI dalam tata hukum perbankan nasional. Pemeliharaan dan pengembangan BMI terlepas dari keikutsertaan secara intensif dari pihak Bank Indonesia, manajemen internal BMI, dan partisipasi umat Islam. Ada suatu pola dinamis dari umat Islam bahwa masyarakat berinteraksi dengan lingkungan, yang kemudian memunculkan realisasi pembentukan BMI. Pembentukan BMI mengindikasikan kedewasaan perilaku masyarakat dalam pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan BMI sebagai implikasi dan konsekuensi logis atas interaksi yang dilakukannya dengan lingkungan sosial yang ada.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer*. Bandung: Mizan, 2000
- Akhmad, Akbar S. *Postmodernisme and Islam*. London: Routledge, 1992
- Al-Buraey, Muhammad. *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, terj. Ahmad Natsir Budiman. Jakarta: Rajawali Press, 1986
- Antonio, M. Syafii. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Arf, Mohammad. *Toward the Syari'ah Paradigm of Islamic Economic: The Beginning of a Scientific Revolution*, Th American Journal of Islamic Social Science
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Alfabet, 1999
- Aziz, Amin. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Bangkit, 1992
- Bank Indonesia. "Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia". April 1999
- Berger, Peter L dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge*. London: Penguin Books, 1966
- Blumer, Herbert. *Symbolik Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs. N.J. Prentice Hall Inc, 1996
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta. PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Docherty, Thomas (ed). *Postmodernism*. New York. Harvester Wheatsheaf, tt
- Effendi, Bahtiar. *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta. Paramadina, 1998
- El-Diwany, Tarek. *The Problem with Interest*. Jakarta. Akbar Media Eka Sarana, 2005
- Gafoor, ALM. Abdul. *Interest Free Commercial Banking*, 1995
- Gellner, Ernest. *Postmodernisme, Reason, and Religion*. London. Routledge, 1992
- . *A Pendulum Swing Theory of Islam, Annales de Sociology*. 1968
- Hadiwinata, Bob Sugeng. "Thetrum Politicum", Posmodernisme dan Krisis Kapitalisme Dunia". dalam *Kalam*. edisi 01
- Heriyanto, Ariel. "Bahasa dan Kuasa", dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan, Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan, 1996
- Laporan Tahunan BMI 1992. Jakarta. BMI, 1992
- Manan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics, Theory and Practice*. Lahore. Muhammad Ashraf, 1970
- Meuleman, Johan Hendrik (et.al.). *Islam in Indonesia, A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993*. Jakarta. INIS, 1995
- Minhadji, Akhmad. "Supermasi Hukum dalam Masyarakat Madani, Perspektif

- Hukum Islam”. dalam *Unisia*. No. 41/XXII/IV/2000
- . “Reorientasi Kajian Ushul Fiqh”. dalam *al-Jâmi’ah*, IAIN Sunan Kalijaga. No. 63/VI/1999
- Noor, Zainul Bahar .”Persiapan dan Oprasional Bank Muamalat Indonesia”. Makalah. tidak diterbitkan, 1991
- . “Sebuah Mimpi, Harapan, dan Kenyataan di Hadapan”, Makalah pada Seminar Sehari “ Kiat Bisnis dari Sudut Pandang Islam”. Garden Palace Hotel Surabaya, 12 September 1992
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi’i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta. Yayasan Dana Bhakti Wakaf, 1992
- . “Peluang dan Strategi Oprasional Bank Muamalat Indonesia”. Makalah. tidak diterbitkan, 21 November 1991
- Robertson, Roland (ed.). *Sociology of Religion, Selected Readings*. Australia. Penguin Books, 1969
- Rosenau, Pauline M. *Postmodernisme and The Social Sciences, Insight, Inroads, and Intrusions*. New Jersey. Princenton University Press, 1992
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interes, A Study of Prohibiton of Riba’ and Its Contemporary Interpretation*. Leiden-New-York-Koln. E.J. Brill, 1996
- Shidiqi, Muhammad Nejatullah. *Muslim Economic Thinking, A Suvey of Contemporary Literatur*. Leicester. Islamic Foundation, 1981
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta. Rajawali Press, 1996
- Syahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti, 1999
- Thaba, Abdul Azi. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta. Gema Insani Press, 1996
- Triuwono, Iwan. “Diri Muthmainah dan Disiplin Sakral”. dalam *Ulûmul Qur’an*. No. 3 VII/1997
- . *Organisasi dan Akutansi Syariah*. Yogyakarta. LkiS, 2000
- Yasin, M. Nur. *Hukum Ekonomi Syariah, Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang. UIN Malang Press, 2009
- Zuhri, Muh. *Riba dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 1996